



Judul : Contoh Singapura-UEA, komisi XI kebut bahas RUU PFII
Tanggal : Minggu, 05 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Contoh Singapura-UEA Komisi XI Kebut Bahas RUU PFII

ANGGOTA Komisi XI DPR Amin Ak menjelaskan, RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global. Regulasi ini patut didukung karena mengacu pada praktik terbaik sejumlah negara dalam mengembangkan pusat keuangan internasional.

Dia menyebut negara-negara seperti Singapura dan Uni Emirat Arab berhasil berkembang menjadi pusat keuangan global. Hal itu menjadi tolok ukur bagi banyak negara. Pembentukan PFII, kata Amin, diharapkan mampu membuka ruang lebih luas bagi investor global untuk menanamkan modal di Indonesia.

Arus investasi tersebut akan mendorong pembangunan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. "Namun, proses penyusunan RUU ini tetap harus melibatkan masyarakat luas agar memperoleh legitimasi publik," tegasnya, Jumat (3/7/2026).

Dia meyakini Indonesia memiliki modal untuk bersaing sebagai pusat keuangan internasional karena didukung sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, serta potensi sumber daya manusia yang kuat. Selain itu, ekonomi syariah dan industri halal juga berpotensi menjadi keunggulan Indonesia di tingkat global. Sektor tersebut, lanjutnya, akan diu-sulkan mendapat ruang dalam regulasi.

Amin menilai, target pertumbuhan ekonomi nasional

sebesar 8 persen membutuhkan arus investasi yang besar. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendanaan dari dalam negeri untuk mewujudkan target tersebut. Kehadiran PFII dapat menjadi pintu masuk bagi investor global melalui berbagai insentif dan kekhususan yang kompetitif.

Dia berharap, pembahasan RUU PFII dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. "Keterbukaan itu akan membuat Indonesia memiliki pusat finansial internasional yang berdaya saing tinggi serta mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat," ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menambahkan, pembahasan regulasi ini menjadi prioritas utama komisi-nya. Hal ini mengingat amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mewajibkan penyelesaian aturan tersebut dalam kurun waktu tiga bulan. Bahkan, Komisi XI sengaja mengosongkan seluruh agenda untuk memfokuskan pembahasan RUU ini.

Komisi XI, sambung Misbakhun, segera menyusun jadwal pembahasan secara intensif agar draf RUU dapat diselesaikan sebelum masa sidang berakhir pada 22 Juli 2026. "Proses ini akan berjalan secara menyeluruh melalui serangkaian pembahasan substansi, lobi antarfraksi, hingga penyalarsan akhir bersama Pemerintah," ungkapnya. ■ TIF